



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE TAHUN 2024

PEMERINTAH KAB. MAMASA



Sinergi untuk Indonesia Maju

KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga seluruh agenda tahapan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dilaksanakan pada Tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Besar harapan kami bahwa hasil evaluasi SPBE tahun 2024 dapat menggambarkan progres kemajuan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga memberikan panduan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan penerapan SPBE yang selaras dengan kebijakan nasional. Dengan semangat tersebut, maka dampak terciptanya layanan SPBE berkualitas, terintegrasi, dan berdaya guna yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi masyarakat luas dapat diwujudkan secara konkret.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas upaya yang telah dilakukan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan progres penerapan SPBE, serta sinergi yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional dan Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, sehingga pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar.

Jakarta, 1 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata
Laksana

NIP. 197208081996032001

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi SPBE ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.

Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interview, serta Penilaian Visitasi (pada lokus tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses



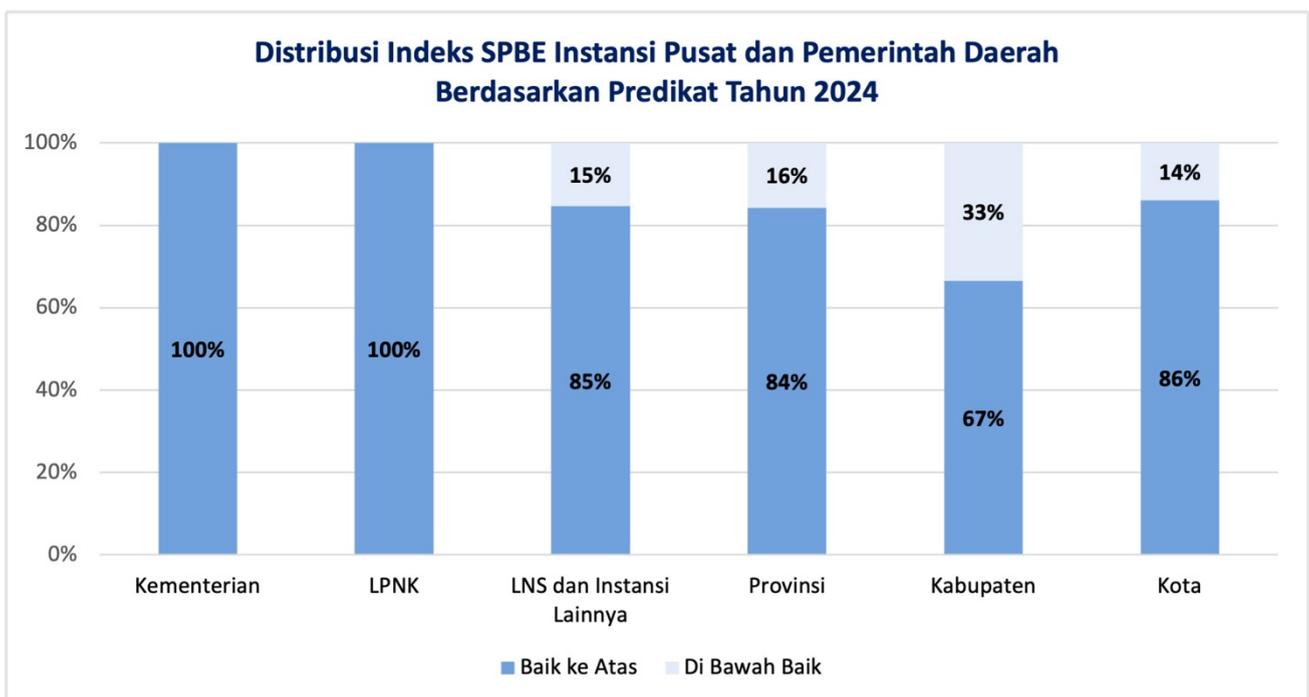
Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi



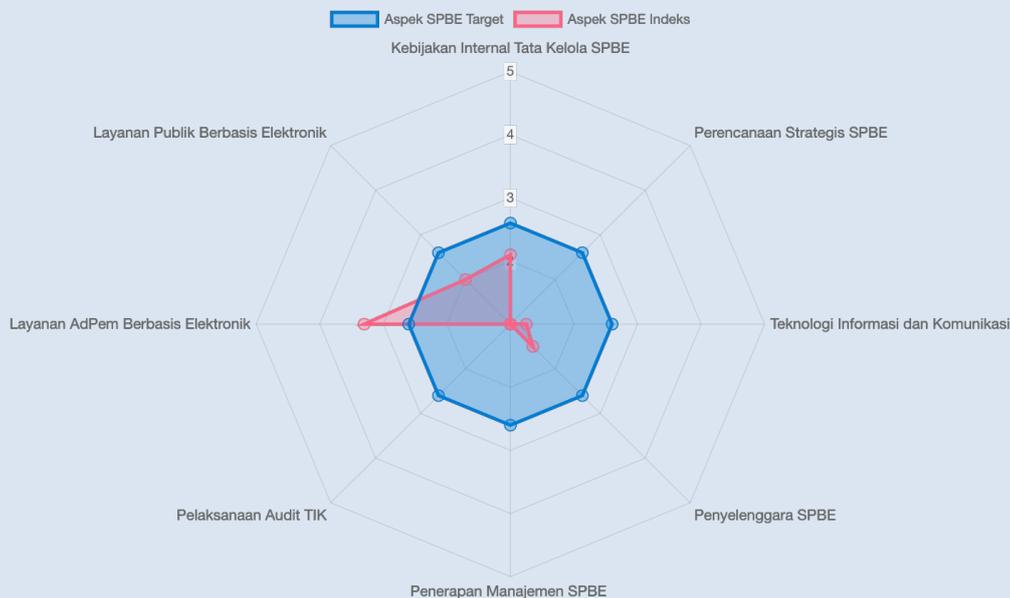
EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																			
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 – 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 – < 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 – < 3,5</td> <td>Baik *)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 – < 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>< 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang	*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)
NO	NILAI INDEKS		PREDIKAT																		
1	4,2 – 5,0		Memuaskan																		
2	3,5 – < 4,2		Sangat Baik																		
3	2,6 – < 3,5		Baik *)																		
4	1,8 – < 2,6		Cukup																		
5	< 1,8		Kurang																		
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																				
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%																				
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																				
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																				
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																				
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%																				
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																				
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																				
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%																				
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																				
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																				

Indeks	Rata-Rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Instansi Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	3,12	4,03	3,82	3,37	3,42	2,45	3,39
Domain Kebijakan	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	2,51	3,64
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	3,23	3,64
Domain Tata Kelola	2,62	3,92	3,65	3,11	3,07	1,69	2,94
Perencanaan Strategis	2,41	3,74	3,68	3,01	2,84	1,54	2,60
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75	4,06	3,75	3,11	3,26	1,76	3,10
Penyelenggaraan SPBE	2,80	4,00	3,40	3,32	3,14	1,85	3,31
Domain Manajemen	1,86	2,87	2,61	2,31	2,17	1,13	2,03
Penerapan Manajemen SPBE	1,91	2,96	2,68	2,38	2,19	1,16	2,09
Audit TIK	1,73	2,64	2,44	2,13	2,12	1,07	1,88
Domain Layanan SPBE	3,78	4,44	4,26	3,81	3,98	3,32	4,05
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,77	4,35	4,20	3,90	3,95	3,40	3,99
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,80	4,58	4,36	3,67	4,04	3,21	4,15



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	2,01
Domain Kebijakan SPBE	2,10
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	<i>2,10</i>
Domain Tata Kelola SPBE	1,20
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	<i>1,00</i>
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	<i>1,25</i>
<i>Penyelenggara SPBE</i>	<i>1,50</i>
Domain Manajemen SPBE	1,00
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	<i>1,00</i>
<i>Audit TIK</i>	<i>1,00</i>
Domain Layanan SPBE	2,79
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	<i>3,30</i>
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	<i>2,00</i>

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan, penerapan pada Aspek Kebijakan di Kabupaten Mamasa masih menunjukkan tingkat kematangan yang rendah. Hanya indikator Kebijakan Tim Koordinasi SPBE yang mencapai Tingkat Kematangan 3, sementara sebagian besar indikator lainnya, termasuk Kebijakan Arsitektur SPBE, Kebijakan Peta Rencana SPBE, dan Kebijakan Manajemen Data, masih berada pada Tingkat Kematangan 2.

- **Kekuatan**
Kekuatan Tidak ditemukan kekuatan pada Aspek Kebijakan di Kabupaten Mamasa, karena tidak ada indikator yang mencapai Tingkat Kematangan 4 atau 5.
- **Kelemahan**
Sebagian besar indikator pada Aspek Kebijakan masih berada pada Tingkat Kematangan 2, seperti Kebijakan Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, dan Layanan Pusat Data. Hal ini menunjukkan kurangnya pengaturan kebijakan yang terstandar dan terpadu dalam mendukung implementasi SPBE. Selain itu, aspek yang berhubungan dengan keamanan informasi dan audit TIK juga masih memerlukan perhatian khusus untuk penguatan kebijakan agar sesuai dengan pedoman nasional. Kabupaten Mamasa perlu memperbaiki dan menyusun kebijakan internal secara lebih komprehensif, mencakup seluruh komponen, referensi, domain, dan proses pada masing-masing indikator SPBE. Kebijakan tersebut perlu dipastikan sah dan berlaku pada seluruh unit kerja terkait dan didukung oleh regulasi yang jelas untuk meningkatkan efektivitas penerapan SPBE. Dengan adanya penguatan ini, diharapkan evaluasi mendatang dapat menunjukkan perbaikan yang signifikan pada aspek kebijakan.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan, penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE di Kabupaten Mamasa masih berada pada tingkat yang sangat rendah, dengan semua indikator—Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, dan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE—berada pada Tingkat Kematangan 1. Hal ini mencerminkan belum adanya pengelolaan yang memadai dalam perencanaan strategis SPBE.

- **Kekuatan**
Tidak ditemukan kekuatan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE, karena semua indikator berada pada Tingkat Kematangan 1.
- **Kelemahan**
Sebagian besar kelemahan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE terlihat pada indikator Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, dan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE yang masih berada pada Tingkat Kematangan 1. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada dokumen rencana strategis yang disusun secara formal dan terpadu, serta tidak adanya keterpaduan yang jelas antara perencanaan dan penganggaran SPBE. Kondisi ini berpotensi menghambat implementasi SPBE yang terarah dan sesuai pedoman. Kabupaten Mamasa perlu segera menyusun dokumen perencanaan strategis SPBE yang mencakup Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE sesuai dengan pedoman nasional. Selain itu, penting untuk memastikan keterpaduan antara rencana strategis dan alokasi anggaran agar implementasi SPBE dapat berjalan dengan efektif. Upaya ini memerlukan dukungan regulasi yang jelas serta partisipasi aktif dari seluruh unit kerja terkait.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pemenuhan Aspek Secara keseluruhan, penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Mamasa menunjukkan tingkat kematangan yang sangat rendah. Indikator Layanan Pusat Data berada pada Tingkat Kematangan 2, sementara indikator lainnya, seperti Inovasi Proses Bisnis SPBE, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Jaringan Intra, dan Sistem Penghubung Layanan, masih berada pada Tingkat Kematangan 1.

- **Kekuatan**
Kekuatan Tidak ditemukan kekuatan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, karena tidak ada indikator yang mencapai Tingkat Kematangan 4 atau 5.
- **Kelemahan**
Sebagian besar indikator pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi masih berada pada Tingkat Kematangan 1, termasuk Inovasi Proses Bisnis SPBE, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Jaringan Intra, dan Sistem Penghubung Layanan. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur teknologi, pengelolaan aplikasi, serta dokumentasi proses belum dikembangkan secara memadai untuk mendukung penerapan SPBE. Selain itu, Layanan Pusat Data yang berada pada Tingkat Kematangan 2 juga memerlukan perhatian khusus untuk meningkatkan

kapabilitasnya agar dapat memenuhi standar pengelolaan data yang efektif dan aman. Kabupaten Mamasa perlu segera melakukan perbaikan pada infrastruktur TIK, termasuk membangun layanan jaringan intra dan sistem penghubung layanan yang terintegrasi sesuai pedoman nasional. Selain itu, penting untuk mendorong inovasi dalam proses bisnis SPBE melalui transformasi digital yang lebih terarah. Pembangunan aplikasi SPBE juga perlu dirancang secara strategis untuk mendukung operasional dan pelayanan publik secara elektronik. Dengan peningkatan ini, diharapkan evaluasi mendatang menunjukkan progres yang lebih baik pada aspek TIK.

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan, penerapan pada Aspek Penyelenggara SPBE di Kabupaten Mamasa masih berada pada tingkat kematangan yang rendah. Indikator Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE berada pada Tingkat Kematangan 2, sedangkan indikator Kolaborasi Penerapan SPBE masih berada pada Tingkat Kematangan 1.

- Kekuatan
Tidak ditemukan kekuatan pada Aspek Penyelenggara SPBE, karena tidak ada indikator yang mencapai Tingkat Kematangan 4 atau 5.
- Kelemahan
Kelemahan utama terlihat pada indikator Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE yang hanya berada pada Tingkat Kematangan 2, serta Kolaborasi Penerapan SPBE yang masih berada pada Tingkat Kematangan 1. Kondisi ini menunjukkan bahwa tim koordinasi belum berfungsi secara optimal dan kolaborasi lintas unit kerja atau dengan pihak eksternal belum terjalin dengan baik. Hal ini berpotensi menghambat koordinasi strategis dan integrasi penerapan SPBE. Kabupaten Mamasa perlu memastikan tim koordinasi SPBE diberikan tugas dan program kerja secara formal agar dapat berfungsi secara efektif. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kolaborasi penerapan SPBE dengan melibatkan unit kerja internal, instansi pemerintah lainnya, perguruan tinggi, serta pelaku usaha dan masyarakat. Langkah ini dapat mempercepat penerapan SPBE yang lebih terintegrasi dan sesuai dengan pedoman nasional.

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan, penerapan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE di Kabupaten Mamasa masih berada pada tingkat kematangan yang sangat rendah. Semua indikator, termasuk Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, Manajemen Aset TIK, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan SPBE, berada pada Tingkat Kematangan 1.

- Kekuatan
Tidak ditemukan kekuatan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE, karena tidak ada indikator yang mencapai Tingkat Kematangan 4 atau 5.
- Kelemahan
Seluruh indikator pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE masih berada pada Tingkat Kematangan 1, yang menunjukkan bahwa penerapan manajemen belum dilakukan secara formal dan terstruktur. Hal ini termasuk manajemen risiko, keamanan informasi, data, aset TIK, serta kompetensi SDM yang belum optimal. Selain itu, penerapan manajemen pengetahuan, perubahan, dan layanan SPBE juga belum ada pelaksanaan manajemen dengan jelas untuk mendukung implementasi SPBE. Kabupaten Mamasa perlu melakukan langkah strategis untuk meningkatkan penerapan manajemen SPBE secara keseluruhan. Hal ini meliputi pengembangan program manajemen risiko, penguatan keamanan informasi berbasis pedoman nasional, dan peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan berkelanjutan. Selain itu, perlu diterapkan manajemen data, aset TIK, dan layanan SPBE yang terencana dan terarah untuk mendukung integrasi dan efisiensi. Dengan upaya ini, diharapkan tingkat kematangan penerapan manajemen SPBE dapat meningkat secara signifikan pada evaluasi mendatang.

F. Pelaksanaan Audit TIK

Secara keseluruhan, penerapan pada Aspek Audit TIK di Kabupaten Mamasa berada pada tingkat kematangan yang sangat rendah. Seluruh indikator, yaitu Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE, dan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE, masih berada pada Tingkat Kematangan 1.

- Kekuatan
Tidak ditemukan kekuatan pada Aspek Audit TIK, karena tidak ada indikator yang mencapai Tingkat Kematangan 4 atau 5.
- Kelemahan
Kelemahan pada Aspek Audit TIK terlihat pada semua indikator, yaitu Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE, dan Pelaksanaan Audit Keamanan

SPBE, yang belum dilaksanakan secara formal. Hal ini mencerminkan belum adanya mekanisme audit yang terstandar, terjadwal, dan berpedoman pada regulasi nasional. Ketiadaan audit ini berpotensi meningkatkan risiko terkait infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE. Kabupaten Mamasa perlu segera menyusun kebijakan pelaksanaan audit TIK yang mengacu pada standar nasional, seperti pedoman BRIN untuk Audit Infrastruktur dan Aplikasi SPBE serta pedoman BSSN untuk Audit Keamanan SPBE. Audit ini perlu dilakukan secara rutin dengan melibatkan auditor internal dan eksternal bersertifikasi. Selain itu, penting untuk menindaklanjuti setiap hasil temuan audit dengan program perbaikan yang terencana agar tata kelola TIK dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan, penerapan pada Aspek Layanan Administrasi di Kabupaten Mamasa menunjukkan tingkat kematangan yang beragam. Indikator seperti Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, serta Layanan Kepegawaian berada pada Tingkat Kematangan 4, mencerminkan pelaksanaan yang cukup baik dan sesuai dengan pedoman. Namun, beberapa indikator seperti Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Layanan Kinerja Pegawai masih berada pada Tingkat Kematangan 3, sementara Layanan Pengawasan Internal Pemerintah dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi berada pada Tingkat Kematangan 2.

- Kekuatan
Kekuatan utama pada Aspek Layanan Administrasi di Kabupaten Mamasa adalah indikator yang berada pada Tingkat Kematangan 4, seperti Layanan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa, serta Kepegawaian. Hal ini menunjukkan kemampuan dalam pengelolaan layanan administrasi yang cukup efektif dan efisien, didukung oleh penggunaan aplikasi dan sistem yang telah diimplementasikan dengan baik.
- Kelemahan
Kelemahan pada Aspek Layanan Administrasi terlihat pada indikator Layanan Pengawasan Internal Pemerintah dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi yang berada pada Tingkat Kematangan 2. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendukung kedua layanan ini belum dikembangkan secara optimal, baik dari sisi regulasi maupun implementasi teknis, yang dapat memengaruhi tata kelola administrasi secara keseluruhan. Kabupaten Mamasa perlu meningkatkan kapabilitas Layanan Pengawasan Internal Pemerintah dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan mengadopsi aplikasi umum berbagi pakai atau mengembangkan sistem yang mendukung integrasi data antarunit kerja. Selain itu, layanan pada Tingkat Kematangan 3, seperti Layanan Kearsipan Dinamis dan Layanan Kinerja Pegawai, dapat ditingkatkan melalui penguatan interoperabilitas sistem dan pelatihan SDM untuk memaksimalkan pemanfaatan aplikasi yang ada. Dengan langkah ini, diharapkan seluruh indikator pada Aspek Layanan Administrasi dapat mencapai tingkat kematangan yang lebih tinggi.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan, penerapan pada Aspek Layanan Publik di Kabupaten Mamasa masih berada pada tingkat kematangan yang rendah. Indikator Layanan Pengaduan Pelayanan Publik berada pada Tingkat Kematangan 3, sementara indikator lainnya, seperti Layanan Data Terbuka, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), serta berbagai layanan publik sektor, berada pada Tingkat Kematangan 2 atau 1.

- Kekuatan
Tidak ditemukan kekuatan pada Aspek Layanan Publik, karena tidak ada indikator yang mencapai Tingkat Kematangan 4 atau 5.
- Kelemahan
Kelemahan pada Aspek Layanan Publik terlihat pada sebagian besar indikator, khususnya Layanan Publik Sektor, Layanan Data Terbuka, JDIH, dan layanan publik lainnya yang berada pada Tingkat Kematangan 1 dan 2. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi layanan publik belum berjalan secara optimal, baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaannya, sehingga menghambat keterbukaan informasi dan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan publik yang efektif. Kabupaten Mamasa perlu mempercepat implementasi layanan publik yang berbasis elektronik, terutama pada layanan yang sudah tersedia sebagai aplikasi berbagi pakai nasional. Langkah ini mencakup pengembangan dan operasionalisasi aplikasi untuk Layanan Data Terbuka, JDIH, dan layanan sektor lainnya. Selain itu, penting untuk memperkuat Layanan Pengaduan Pelayanan Publik yang sudah berada pada Tingkat Kematangan 3 dengan meningkatkan responsivitas dan integrasi sistem untuk memaksimalkan manfaatnya bagi masyarakat. Dengan peningkatan ini, diharapkan Kabupaten Mamasa dapat memberikan layanan publik yang lebih efektif, efisien, dan transparan.

REKOMENDASI

Secara prinsip, Kabupaten Mamasa masih perlu memperkuat implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE agar dapat meningkatkan tingkat kematangan secara keseluruhan. Dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Kabupaten Mamasa, nilai total indeks SPBE mencapai 2,0055, yang termasuk dalam predikat cukup. Adapun penerapan ini mencakup berbagai aspek, dengan fokus utama untuk meningkatkan integrasi, perencanaan strategis, dan tata kelola di seluruh komponen SPBE.

Keunggulan penerapan SPBE di Kabupaten Mamasa terlihat pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (3,30). Hal ini mencerminkan upaya yang cukup baik dalam pengelolaan layanan administrasi seperti perencanaan, penganggaran, keuangan, dan pengadaan barang dan jasa. Dengan memperkuat interoperabilitas layanan administrasi dan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas layanan dapat semakin ditingkatkan.

Kelemahan utama pada penerapan SPBE di Kabupaten Mamasa terdapat pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE (1,00), Penerapan Manajemen SPBE (1,00), dan Pelaksanaan Audit TIK (1,00). Rendahnya tingkat kematangan pada aspek ini mencerminkan bahwa dokumen perencanaan strategis, seperti Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE, belum tersedia atau diterapkan secara formal. Selain itu, kurangnya manajemen risiko, data, dan aset TIK, serta ketiadaan pelaksanaan audit TIK yang terstandar, menghambat tata kelola yang efektif dan meningkatkan risiko terhadap keamanan dan keandalan sistem.

Pada Aspek Layanan Publik (2,00), walaupun sudah pada predikat cukup namun masih perlu ditingkatkan, seperti Layanan Data Terbuka, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), serta layanan sektor lainnya yang berada pada Tingkat Kematangan 2 atau lebih rendah. Kelemahan ini mencerminkan belum adanya pengembangan layanan publik berbasis elektronik yang optimal, sehingga keterbukaan informasi dan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan masih terbatas. Hal ini berpotensi mengurangi tingkat kepuasan dan partisipasi masyarakat dalam penggunaan layanan publik yang disediakan.

Kabupaten Mamasa juga perlu melakukan penguatan pada Aspek Kebijakan dengan memastikan bahwa kebijakan internal mencakup keterpaduan seluruh indikator SPBE dan diterapkan secara menyeluruh di seluruh unit kerja. Tim Koordinasi SPBE dan seluruh OPD perlu diberikan mandat formal untuk melaksanakan tugasnya secara strategis untuk menjalankan SPBE, dengan program kerja yang melibatkan kolaborasi lintas instansi, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan masyarakat.

Kabupaten Mamasa perlu mempercepat implementasi dokumen perencanaan strategis yang mencakup seluruh referensi dan domain terkait, dengan mengacu pada pedoman nasional. Selain itu, penting untuk menyusun kebijakan manajemen yang lebih terarah, meliputi program pengelolaan risiko, keamanan informasi, dan penguatan kompetensi SDM. Untuk pelaksanaan audit, perlu segera diterapkan sesuai standar BRIN dan BSSN dengan melibatkan auditor internal dan eksternal yang bersertifikasi untuk memastikan integritas dan keandalan sistem.

Dari sisi layanan, penguatan interoperabilitas pada aplikasi layanan administrasi yang sudah berjalan dapat memberikan manfaat besar dalam meningkatkan efisiensi. Untuk Layanan Publik, perlu diupayakan pengembangan aplikasi berbagi pakai yang dapat diterapkan secara efektif, serta penguatan sistem pengaduan dan transparansi layanan publik.

Pelatihan SDM yang memahami pedoman dan indikator SPBE secara mendalam juga menjadi prioritas agar semua komponen SPBE dapat diimplementasikan secara optimal. Dengan evaluasi dan peningkatan berkelanjutan ini, Kabupaten Mamasa diharapkan dapat mencapai tingkat kematangan SPBE yang lebih baik pada evaluasi berikutnya.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2024
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi	2
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	2
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	2
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	2
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	2
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	2
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung	2
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	2
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	2
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	1
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	1
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	1
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	1
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	1
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi	2
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	1
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	3
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	2
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	2
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	3

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	3
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	2
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi	2
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	2
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	2
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	1



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



Sinergi untuk Indonesia Maju

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2024